

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH (RTRW)**

**(Studi Kasus: Pengembangan Sistem Permukiman di Kota Padang
Tahun 2024-2025)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

LIDRA SYARIF PUTRA

BP. 2110832023



Dosen Pembimbing:

Dr. Tengku Rika Valentina, MA

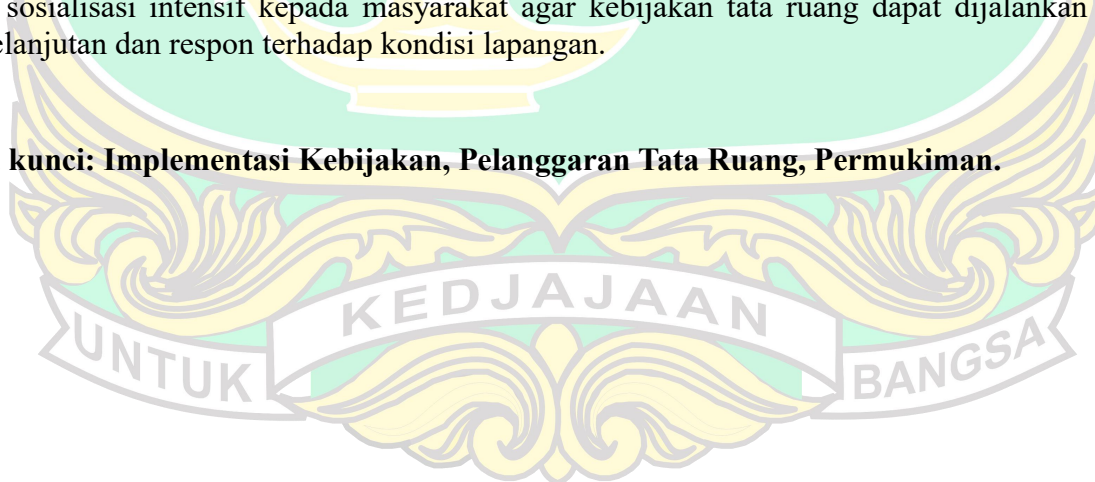
Andhik Beni Saputra, S.IP., MA

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Studi Kasus: Pengembangan Sistem Permukiman di Kota Padang Tahun 2024-2025), dengan fokus pada pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di Kota Padang. Penelitian dilakukan di tiga lokasi yang dianggap representatif terhadap bentuk pelanggaran tata ruang, yaitu Kecamatan Padang Barat (pelanggaran sempadan sungai), Padang Utara (pelanggaran kawasan resapan air), dan Bungus Teluk Kabung (pelanggaran sempadan pantai). Pemilihan lokasi didasarkan pada tingkat pelanggaran yang tinggi, signifikansi ekologis, dan relevansi strategis kawasan terhadap pengendalian tata ruang kota. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, penelitian ini mengungkap bahwa implementasi Perda RTRW masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ukuran dan tujuan kebijakan telah dirumuskan jelas dalam dokumen RTRW, namun tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat maupun aparat pelaksana; (2) keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menghambat pengawasan lapangan secara berkala; (3) karakteristik agen pelaksana menunjukkan masih adanya tumpang tindih tugas antarorganisasi; (4) sikap pelaksana belum menunjukkan komitmen kuat dalam menindak pelanggaran secara tegas; (5) komunikasi antarinstansi masih lemah, ditandai dengan kurangnya koordinasi antara Dinas PUPR, Satpol PP, dan perangkat kecamatan; dan (6) kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan pelanggaran menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan zonasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berupa berita daring dan dokumentasi visual dari media sosial memperkuat bukti terjadinya pelanggaran. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan tata ruang belum berjalan efektif karena lemahnya respon terhadap pemanfaatan ruang serta kurangnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta sosialisasi intensif kepada masyarakat agar kebijakan tata ruang dapat dijalankan secara berkelanjutan dan respon terhadap kondisi lapangan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pelanggaran Tata Ruang, Permukiman.



ABSTRACT

This study examines the implementation of Padang City Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning Spatial Planning (RTRW) (Case Study: Development of Settlement Systems in Padang City 2024-2025), focusing on land-use violations occurring in Padang City. The research was conducted in three selected districts that represent different forms of spatial violations: Padang Barat (river border violations), Padang Utara (infiltration area violations), and Bungus Teluk Kabung (coastal boundary violations). These locations were chosen based on the frequency of violations, ecological significance, and their strategic relevance to urban spatial control. Using a descriptive qualitative approach and the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn, the study reveals several obstacles in the field. The findings indicate that: (1) the size and objectives of the policy are clearly stated in the RTRW document but are not fully understood by both the public and implementing agents; (2) limited human resources and budgets hinder regular field monitoring; (3) there is an overlap of duties among implementing agencies; (4) implementers often show weak commitment in enforcing regulations; (5) inter-agency communication is weak, marked by poor coordination between the Public Works Department (PUPR), municipal police, and sub-district authorities; and (6) the socio-economic conditions of residents in the violation-prone areas show a strong dependence on land use that contradicts zoning regulations. Primary data were obtained through interviews and field observations, while secondary data in the form of online news articles and visual documentation from social media were used to support the findings. The study concludes that RTRW policy implementation remains ineffective due to weak spatial control and limited public awareness. This research recommends strengthening monitoring mechanisms, enhancing cross-sectoral coordination, and intensifying community education to ensure the sustainability and responsiveness of spatial policy implementation.

Keywords: Policy Implementation, Spatial Planning, Settlement

